

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ini, gaya hidup konsumtif telah menjadi fenomena umum di masyarakat. Kebutuhan yang semakin bertambah, ditambah dengan daya beli masyarakat yang meningkat, menjadikan gaya hidup konsumtif sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang.

Perkembangan teknologi di sektor keuangan turut mendukung tren konsumtif ini untuk tumbuh dengan sangat pesat. Instrumen digital muncul, memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Pada masa kini, metode pembayaran tidak lagi terbatas hanya menggunakan uang tunai secara fisik, melainkan dapat dilakukan tanpa menggunakan uang tunai atau *cashless*. *Cashless* merujuk pada transaksi pertukaran nilai tanpa melibatkan uang fisik sebagai alat pembayaran, melainkan menggunakan saldo *e-money* sebagai bentuk uang elektronik. Selama lima tahun terakhir, transaksi *cashless* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat, yang didukung secara langsung oleh Bank Indonesia melalui QRIS sebagai sistem pembayaran *cashless*. QRIS memberikan kontribusi signifikan pada peningkatan transaksi di masyarakat. Menurut pendapat Febrianty, (2019), orang-orang beralih ke instrumen pembayaran digital non-tunai karena dianggap lebih praktis, efisien, dan aman dibandingkan dengan uang tunai.

Meskipun *cashless* semakin populer, terdapat situasi di mana pelanggan menginginkan barang atau jasa, tetapi tidak memiliki uang digital maupun tunai yang cukup, sehingga transaksi tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi hal ini, opsi pembelian secara kredit menjadi alternatif yang memungkinkan pelanggan untuk menunda pembayaran sesuai kesepakatan, tanpa melakukan pelunasan secara langsung. Pembelian secara kredit telah berkembang dengan munculnya metode baru, seperti sistem *Paylater*.

Seperti namanya, *Paylater* adalah sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran dengan membayar secara cicilan, dengan jumlah cicilan tertentu yang disepakati pembeli dengan penyedia layanan. Selain membayar jumlah pokok nominal pembelian, pembeli juga diharuskan membayar

bunga dan biaya lainnya seperti biaya penanganan. *Paylater* menjadi solusi pembelian bagi masyarakat untuk mendapatkan barang atau jasa tanpa membayar secara penuh di muka, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati sebelumnya. Dengan adanya *Paylater*, pembelian secara kredit semakin populer, menjadikannya alternatif menarik selain metode pembayaran non-tunai bagi masyarakat.

Di sisi lain, bagi perusahaan, meski penjualan secara kredit membawa dampak positif, namun tidak lepas dari risiko terkait dengan piutang usaha yang belum dilunasi. Kondisi dimana piutang usaha tak kunjung dilunasi dapat menimbulkan tantangan likuiditas dan dapat menghambat kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Sebagai langkah strategis untuk mendorong pelunasan, perusahaan menerapkan termin penjualan dengan memberikan jangka waktu kredit atau batas waktu pelunasan, bahkan mengorbankan sebagian keuntungan dalam bentuk potongan termin. Sebagai contoh, termin penjualan 2/10 n/30 menunjukkan bahwa pelanggan diharuskan melunasi pembelian dalam waktu 30 hari, dengan potongan 2% jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari pertama.

Sementara kebijakan penjualan kredit meningkatkan risiko *bad debt* (piutang yang tidak dapat ditagih), tidak memberikan opsi kredit juga akan berpotensi untuk kehilangan pelanggan yang beralih ke pesaing yang menyediakan fasilitas kredit. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan harus mempertimbangkan secara cermat manfaat dan risiko terkait penjualan secara kredit sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan laba.

Dari segi pencatatan, pencatatan akuntansi atas piutang usaha membawa sejumlah risiko dan potensi kesalahan yang harus diperhatikan secara serius bagi perusahaan. Risiko-risiko tersebut mencakup:

1. Risiko kredit, merupakan risiko akan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur (peminjam) untuk memenuhi pembayaran piutang usaha sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati;
2. Risiko litigasi, merupakan risiko akan terjadinya tuntutan hukum terhadap perusahaan terkait piutang usaha
3. Risiko pengukuran, merupakan risiko yang terjadi karena ketidakpastian ataupun kesalahan dalam proses pengukuran piutang usaha

Pencatatan atas piutang usaha ini penting, bukan hanya sekedar tugas rutin akuntan untuk memenuhi kepatuhan atas aspek legal perusahaan saja, tetapi juga untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Piutang harus dicatat dan dilaporkan dalam jumlah yang benar, karena angka-angka ini menjadi dasar pengambilan keputusan krusial bagi para pemegang kepentingan atau *stakeholder*, termasuk manajemen, investor, dan kreditor. Menurut Sugiyarto (2016), perusahaan menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada jumlah neto yang diharapkan akan diterima dalam bentuk kas atau nilai realisasi kas (*cash realizable value*). Warren dkk. (2017) menyebutkan bahwa tidak ada aturan umum dalam menentukan suatu piutang dikatakan tidak dapat tertagih, namun indikasi gagal bayar pelanggan dapat digunakan untuk memperkirakan kemungkinan piutang tak tertagih. Dalam menghadapi situasi tersebut, pada dasarnya terdapat dua cara untuk mencatat piutang tak tertagih, yaitu *direct write off method* dan *allowance method*.

Pemeriksaan atas piutang usaha menjadi langkah krusial dalam menjaga integritas informasi keuangan suatu perusahaan. Dalam rangka memastikan bahwa pencatatan piutang usaha sesuai dengan standar dan ketentuan akuntansi yang berlaku, auditor menjalankan suatu proses sistematis untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal perusahaan dan substansi akun piutang usaha bersangkutan. Audit ini tidak hanya sekedar memverifikasi catatan keuangan, melainkan juga mencakup identifikasi risiko-risiko potensial yang dapat muncul serta memastikan bahwa piutang usaha terhindar dari kesalahan dan penyelewengan. Dengan demikian, pengelolaan piutang usaha yang baik tidak hanya mencakup aspek teknis pencatatan dan pelaporan, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan dan tindakan pencegahan terhadap risiko potensial.

Melalui pemeriksaan piutang usaha, auditor berperan penting dalam mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Agoes, 2009). Tujuan utama dari audit adalah memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan bahwa informasi yang disajikan oleh entitas tersebut tidak hanya

akurat dan dapat diandalkan, tetapi juga sesuai dengan standar atau kriteria yang berlaku umum. Dengan demikian, audit bukan hanya menjadi alat untuk menilai keuangan suatu perusahaan, melainkan juga sebagai sarana yang melindungi kepentingan *stakeholder* perusahaan, menciptakan kepercayaan, dan menjaga integritas informasi keuangan secara menyeluruh.

Proses audit dilakukan oleh akuntan publik yang bersifat objektif dan independen, yang mana sifat ini merupakan prinsip kunci dalam profesi akuntan publik demi membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil audit tidak terpengaruh oleh kepentingan atau tekanan dari pihak yang diaudit. Auditor juga tunduk pada kode etik profesi dan standar audit yang berlaku, yaitu: SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik). SPAP bertujuan menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme akuntan publik selama pelaksanaan tugas. Prinsip dan standar audit mengatur pendekatan auditor, yang harus ditaati dalam merancang setiap penugasan audit dengan cermat agar memperoleh keyakinan yang memadai terkait keabsahan informasi yang diaudit. Prosedur audit yang diterapkan harus memadai untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau kecurangan, serta memastikan bahwa catatan keuangan mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

Jasa terkait dengan auditing dapat ditemukan di Kantor Akuntan Publik (KAP), sebuah entitas jasa profesional yang menyediakan layanan keuangan terkait akuntansi, audit, dan perpajakan. KAP didirikan oleh individu atau sekelompok akuntan publik yang memenuhi syarat dan telah memperoleh izin usaha dari Kementerian Keuangan. Salah satu contoh KAP terkemuka di Yogyakarta adalah KAP Drs. Abdul Muntalib dan Yunus (yang mana selanjutnya akan penulis singkat menjadi AMY).

KAP AMY merupakan salah satu KAP terkemuka di Jogja, yang telah didirikan oleh Bapak Drs. Abdul Muntalib M.S., Akt., CA., CPA., CPI., CLI., ACPA. KAP ini memiliki anggota akuntan-akuntan yang berpengalaman dan telah beroperasi selama 18 tahun. KAP AMY memiliki reputasi yang solid dalam menangani klien dari berbagai sektor, seperti, perdagangan ekspor dan impor, teknologi informasi, perhotelan, rumah sakit, konstruksi dan pengembangan, *real*

estate, properti, pendidikan, asuransi, dana pensiun, sepak bola, perkebunan, tambang, pemurnian (*refinery*), LSM, *Information Technology* (IT), keuangan pemerintah daerah, BLU, aset entitas, kerajinan, *furniture/mebelair*, tekstil, pedagang, pengecer, agen perjalanan, distributor, percetakan, organisasi, dan transportasi. KAP AMY juga memiliki izin resmi dari Kementerian Keuangan dan BPK serta menjadi anggota aktif IAI dan IAPI, dengan anggotanya yang telah lulus berbagai sertifikasi keahlian akuntan publik yang diselenggarakan oleh IAI, IAPI, BPK, DJP, dan lembaga terkait lainnya. Pemilihan KAP AMY sebagai objek penelitian ini didasarkan pada reputasi dan pengalaman yang kuat dalam melakukan audit di berbagai sektor bisnis yang kompleks dan tentunya sudah menerapkan prosedur audit atas piutang usahanya sendiri.

Penerapan prosedur audit atas piutang usaha yang baik penting, karena jika prosedur audit atas piutang usaha tidak dilakukan dengan baik dan benar, dampaknya dapat sangat fatal bagi keberlanjutan bisnis dan integritas laporan keuangan suatu entitas. Proses audit yang kurang cermat dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi potensi risiko, termasuk potensi kerugian akibat piutang tidak tertagih atau potensi manipulasi laporan keuangan. Kegagalan dalam menjalankan prosedur audit piutang usaha juga dapat berimplikasi langsung pada prinsip kehati-hatian dalam akuntansi, di mana aset dan pendapatan seharusnya tidak diakui melebihi jumlah yang dapat diperoleh. Hal ini berkaitan dengan saldo piutang usaha yang seharusnya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, menunjukkan pentingnya evaluasi yang akurat terhadap potensi nilai realisasi dari piutang tersebut. Jika prosedur audit tidak memadai, entitas dapat kehilangan pemahaman yang tepat tentang nilai bersih yang dapat direalisasi, yang dapat menyebabkan penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan menyesatkan. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur audit piutang usaha yang baik dan teliti merupakan langkah krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan mencegah potensi dampak serius terhadap stabilitas finansial dan reputasi perusahaan.

Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pengujian atas akun piutang usaha di KAP AMY tidak hanya relevan untuk kebutuhan finansial dan keuangan klien, tetapi juga menjadi aspek penting dalam mendukung praktik

akuntansi yang baik dan transparansi keuangan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan observasi dan melaporkan hasil dari observasi mengenai topik tersebut dalam Tugas Akhir dengan judul **“PENERAPAN PROSEDUR AUDIT ATAS PIUTANG USAHA DI KAP DRS. ABDUL MUNTALIB & YUNUS”**.

1.2 Cakupan Pembahasan

Cakupan pembahasan digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Hal ini dilakukan agar pembahasan yang dilakukan penulis tetap terfokus pada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana diagram alir (*flowchart*) prosedur audit atas piutang usaha di KAP AMY?
2. Bagaimana prosedur audit atas piutang usaha yang diterapkan di KAP AMY?
3. Bagaimana cara pengisian kertas kerja pemeriksaan terkait piutang usaha di KAP AMY?

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan Tugas Akhir digunakan untuk menetapkan pencapaian yang diinginkan, dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keberhasilan mencapai tujuan ini akan tercermin dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, di mana penulis diharapkan mampu memberikan jawaban yang memadai.

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta. Adapun tujuan lain, diantaranya:

1. Untuk memahami *flowchart* prosedur audit atas piutang usaha di KAP AMY
2. Untuk memahami bagaimana prosedur audit atas piutang usaha yang diterapkan oleh KAP AMY
3. Untuk memahami bagaimana cara pengisian kertas kerja pemeriksaan piutang usaha di KAP AMY.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan kontribusi positif kepada berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait, diantaranya:

1. Bagi penulis

- a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma Tiga (DIII) Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta,
- b. Menambah Pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan prosedur audit piutang usaha di KAP AMY.

2. Bagi Politeknik YKPN Yogyakarta

Membantu sosialisasi dalam menyampaikan bagaiman prosedur audit piutang usaha yang ada di KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Bagi Pembaca

Agar pembaca dapat mengetahui bagaimana prosedur audit piutang usaha di KAP AMY sesuai prosedur yang berlaku.